

POTENSI EKONOMI SEKTORAL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Yanto Kambaru Njuka Tehik
Fakultas Ekonomi Universitas Wira Wacana Sumba
Email : nto.njuka@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah berkaitan erat dengan kualitas perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu untuk mengidentifikasi masing-masing sektor yang harus dikembangkan oleh masing-masing daerah. Di mana rencana pembangunan daerah dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, kontribusi pemerintah melalui kebijakan yang diperlukan untuk memprioritaskan pengembangan sektor unggulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumentasi teknik. Koleksi metode analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah analisis dominasi sektor dan sektor potensial serta analisis komparatif dan sektor utama. Temuan atau penelitian ini adalah sektor potensial di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2013 adalah sektor industri manufaktur, sedangkan sektor yang dominan adalah di sektor pertanian dan manufaktur.
Kata Kunci : Potensi, Sektor Ekonomi

SECTORS OF ECONOMIC POTENTIAL IN EASTERN SUMBA DISTRICT

Yanto Kambaru Njuka Tehik
Faculty of Economics, Wira Wacana University Sumba
Email : nto.njuka@gmail.com

ABSTRACT

The successful implementation of regional development is closely related to the quality of development planning. Therefore, it is necessary to identify each of the sectors that should be developed by each region. In which the regional development plans can be implemented. In other words, the contribution of the government through policies are needed to prioritize the development of the leading sectors. Data collection techniques in this research is by using techniques documentation. Collection data analysis methods used to answer the question of this research is the analysis of sector dominance and potential sectors as well as comparative analysis and leading sector. The finding or this study is the potential sector in East Sumba regency in 2013 is the sector of manufacturing industry, while the dominant sector is in the agricultural and manufacturing sector.

Key Words : Potential, Economic Sector

PENDAHULUAN

Negara-negara berkembang pada umumnya memiliki karakteristik umum. Menurut Todaro (2010) karakteristik umum dari negara berkembang diklasifikasikan menjadi enam kategori utama. Pertama, standar hidup yang relatif rendah. Kedua, tingkat produktivitas yang rendah. Ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi. Keempat, ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada produksi sektor pertanian serta ekspor produk-produk primer (bahan-bahan mentah). Kelima, pasar yang tidak sempurna dan terbatasnya informasi yang tersedia. Kelima, dominasi, ketergantungan dan kerapuhan yang parah pada hampir semua aspek hubungan internasional. Oleh karena itu, negara berkembang khususnya Indonesia perlu

membuat perencanaan pembangunan ekonomi yang komprehensif agar dapat keluar dari berbagai ketertinggalan disegala bidang.

Perencanaan pembangunan ekonomi yang komprehensif harus bersinergi antara pusat dan daerah. Menurut Kuncoro (2012) ada tiga unsur dasar dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah. Pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis merupakan hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsentrasi akhir dari interaksi tersebut. Kedua, sesuatu yang tampak baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah. Sebaliknya, yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional. Ketiga, perencanaan daerah yang efektif harus dapat membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber daya pembangunan sebaik-sebaiknya. Perencanaan pembangunan daerah, mampu menciptakan tujuan pembangunan nasional selain itu dapat dipadukan dengan tujuan dan kondisi spesifik daerah, (Safi'i, 2009). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari sistem pemerintah dan pembangunan di negara manapun.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah sangat urgen dan menempati posisi yang strategis dalam rangka pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan karena keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dengan adanya perencanaan pembangunan daerah, daerah diharapkan mampu memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki guna mempercepat pembangunan wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah yang tepat, maka dapat mendorong meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas serta kemandirian ekonomi. Hal yang sama penting, menurut Mawardi (2007) bahwa perlu adanya prioritas pembangunan dengan memperhatikan keunggulan wilayah.

Penentuan prioritas sangat tergantung pada tujuan yang dicapai dalam pembangunan daerah setempat khususnya daerah-daerah yang ada di Indonesia. Menurut Marwadi (2007) menyatakan, jika tujuan pembangunan daerah hanya berfokus untuk meningkatkan pertumbuhan, maka pengembangan diarahkan pada sektor atau komoditas unggulan yang nilai tambah tinggi, sebaliknya jika fokus pembangunan daerah untuk mengejar pemerataan, maka pengembangan lebih diprioritaskan pada sektor atau komoditas unggulan yang dapat menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat berdampak pada perkembangan sektor/komoditas yang unggul secara komparatif maupun kompetitif. Selain itu, Tristanto (2013) menyatakan bahwa dalam penentuan kebijakan, haruslah memperhitungkan kondisi internal maupun perkembangan eksternal. Perbedaan kondisi internal dan eksternal yang dimaksud hanya pada jangkauan wilayah, dimana kondisi internal meliputi wilayah daerah/regional, sedangkan kondisi eksternal meliputi wilayah nasional.

Perencanaan pembangunan tentunya perlu melibatkan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah. Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan wilayah dikarenakan pemerintah memiliki wewenang yang besar dalam menciptakan regulator (pengatur atau pengendali), namun peran pemerintah yang besar tidak boleh disalahgunakan. Apabila disalahgunakan tentu akan mengganggu minat investor, pertumbuhan ekonomi akan melambat dan lapangan pekerjaan tidak bertambah melebihi angkatan kerja. Oleh karena itu dana yang dimiliki oleh pemerintah digunakan sebagai stimulan untuk mengarahkan investasi swasta/masyarakat kearah yang diinginkan oleh pemerintah. Dengan demikian, perlu penetapan arah dan sasaran

yang dapat dicapai melalui penggunaan faktor-faktor produksi yang terbatas secara efisien sehingga terciptanya pembangunan yang berkesinambungan.

Pembangunan yang berkesinambungan perlu sebuah pendekatan dalam sebuah perencanaan. Menurut Tarigan (2010) pendekatan perencanaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional (wilayah). Pendekatan sektoral menitik beratkan pada seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor dan sektor tersebut dianalisis satu persatu. Selanjutnya, setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang ditingkatkan dan dimana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut. Namun, pendekatan regional sangat berbeda dengan pendekatan sektoral walaupun tujuan akhirnya adalah sama. Pendekatan sektoral lebih dahulu memperhatikan sektor/komoditi yang kemudian setelah dianalisis, menghasilkan proyek-proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan. Sedangkan pendekatan regional adalah pendekatan yang memperhatikan ruang dengan segala kondisinya. Analisis regional didasarkan pada anggapan bahwa perpindahan orang dan barang berdasarkan daya tarik wilayah.

Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan daerah akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam menyelesaikan masalah pokok pembangunan daerah. Untuk mencapai kondisi yang diinginkan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat harus menggunakan setiap sumber daya untuk menaksir potensi yang ada di daerah tersebut untuk merancang dan membangun perekonomian daerah, Arsyad (2010). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah perlu campur tangan pemerintah jika ingin mencapai proses pembangunan yang lebih cepat. Pentingnya campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah dimaksudkan untuk mencegah agar pembangunan dan hasil-hasilnya tidak dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang buruk.

Salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu ekonomi di suatu wilayah/daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang secara agregat dihitung melalui Produk Domestik (PDRB) yang rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhannya. Dengan perkataan lain bahwa jika suatu sektor mempunyai kontribusi besar sedangkan pertumbuhannya sangat lambat, maka hal ini tentunya dapat menghambat tingkat pertumbuhan secara agregatif. Sebaliknya jika suatu sektor mempunyai kontribusi yang relatif besar total perekonomian, maka sektor tersebut memiliki tingkat pertumbuhan sektoral yang tinggi dan sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena analisis kontribusi digunakan untuk melihat besaran angka PDRB yang dijadikan sebagai indikator untuk menunjukkan kemampuan sumber daya yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah berkaitan erat dengan kualitas perencanaan pembangunan daerah (Yulianita, 2009). Oleh karena itu, perlu mengidentifikasi masing-masing sektor yang layak dikembangkan oleh masing-masing wilayah. Sehingga rencana pembangunan daerah dapat terlaksana. Dengan perkataan lain bahwa kontribusi pemerintah lewat kebijakan-kebijakan sangat dibutuhkan untuk memprioritaskan pembangunan pada sektor unggulan. Hal ini tentunya memungkinkan pendapatan pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur, dimana pembangunannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Kabupaten Sumba Timur berada dikawasan ekonomi antara Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat daya.

Tabel 1.

Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010-2013
Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Lapangan Usaha	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Pertanian	252.456.00	262.511.00	272.890.00	283.713.00
Pertambangan dan Penggalian	12.143.00	12.439.00	12.735.00	13.029.00
Listrik, Gas dan Air Minum	1.941.00	2.097.00	2.253.00	2.417.00
Bangunan Konstruksi	5.858.996.00	59.188.00	60.295.00	61.207.00
Perdagangan	127.156.00	135.303.00	143.602.00	152.621.00
Pengangkutan dan Komunikasi	44.892.00	45.903.00	46.662.00	47.326.00
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	25.100.00	27.060.00	29.259.00	31.604.00
Jasa-Jasa	182.374.00	195.457.00	209.387.00	224.081.00
PDRB	715 555.00	750 478.00	788 308.00	827 969.00

Sumber : BPS Kabupaten Sumba Timur (2014)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga konstan yang paling tinggi pada tahun 2013 di Kabupaten Sumba Timur adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp 283.713 milyar, sektor jasa-jasa sebesar Rp 224.081 milyar, dan sektor perdagangan yaitu sebesar Rp 152.621 milyar.

Namun jika dilihat dari data BPS (2014) menunjukkan bahwa angka pengangguran setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 2.246 jiwa, tahun 2012 naik menjadi 3.240 jiwa, dan tahun 2013 naik menjadi 4.078 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan PDRB setiap tahun, tidak memberikan kontribusi terhadap penurunan jumlah pengangguran di Kabupaten Sumba Timur. Begitu pula dengan angka kemiskinan yang tinggi, pada tahun 2010 sampai tahun 2013 mengalami fluktuasi. Tahun 2010 sebesar 74.000 jiwa, tahun 2011 turun menjadi 71.540 jiwa, tahun 2012 naik menjadi 72.500 jiwa, tahun 2013 turun menjadi 68.800.

Memandang fakta empiris yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu mengidentifikasi dan menganalisis kondisi serta potensi sektor ekonomi menurut sektor/lapangan usaha di Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan guna membuat perencanaan dan membangun perekonomian dengan mengembangkan basis ekonomi sektoral, sektor unggulan dan kesempatan kerja. Oleh karena itu perlu sebuah kebijakan yang dapat memprioritaskan dalam menentukan sektor mana yang diprioritaskan untuk dikembangkan dalam pembangunan daerah.

Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Sektor manakah yang menjadi sektor potensial dan dominan di Kabupaten Sumba Timur tahun 2013?
2. Sektor manakah yang merupakan sektor unggulan Kabupaten Sumba Timur tahun 2013?

TINJAUAN LITERATUR

Pembangunan Ekonomi Daerah

Arsyad (2010) menyatakan bahwa daerah memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Daerah mempunyai tiga definisi dari segi

aspek ekonomi yaitu (1) daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Sifat yang sama tercermin dari segi pendapatan perkapita, sosial-budaya, geografis, dan lain sebagainya. Daerah yang seperti ini disebut sebagai daerah yang homogeny; (2) daerah dianggap sebagai ruang ekonomi yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah ini disebut sebagai daerah modal; (3) suatu daerah adalah suatu ekonomi yang berada dibawah administrasi tertentu, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Daerah yang didefinisikan seperti ini disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Tarigan (2010) tidak menggunakan istilah daerah. Namun istilah yang digunakan untuk menggambarkan daerah adalah wilayah. Menurutnya daerah adalah sebagai wilayah yang mempunyai batas secara jelas berdasarkan yurisdiksi administratif sedangkan wilayah menunjukkan ruang permukaan bumi secara umum tanpa konotasi tentang isi, karakter, maupun kepentingan yang terkait dengannya. Artinya, istilah wilayah dapat digunakan secara fleksibel dan mencakup penggunaan ruang secara umum. Wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu (1) wilayah administrasi pemerintah; (2) kesamaan kondisi; (3) ruang lingkup pengaruh ekonomi; (4) berdasarkan wilayah perencanaan pembangunan wilayah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada di wilayah tersebut (Arsyad, 2012). Berdasarkan definisi tersebut maka pemerintah dan masyarakat perlu membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk mengelola setiap sumber daya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi).

Menurut Todaro (2008) tiga tujuan inti pembangunan adalah (1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; (2) peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan; (3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Arsyad (2010) mendefinisikan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), baik pemerintah, publik, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menciptakan suatu pola saling ketergantungan dan keterkaitan antara aspek-aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek-aspek lainnya dengan cara :

1. Secara kontinu menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah.
3. Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah.
4. Melaksanakannya dengan menggunakan segenap sumber daya yang tersedia.

Pendekatan Sektoral

Pembangunan bidang ekonomi pada dasarnya lebih banyak menggunakan pendekatan sektoral. Menurut Tarigan (2010) menyatakan bahwa pendekatan sektoral adalah dimana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu per satu. Setiap sektor dilihat

potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan dimana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut. Caranya adalah masing-masing sektoral dipreteli (*break-down*) sehingga terdapat kelompok-kelompok yang bersifat homogen. Terhadap kelompok yang homogen ini dapat digunakan peralatan analisis yang biasa digunakan untuk kelompok tersebut. Misalnya untuk menganalisis sektor pertanian, sektor tersebut dapat dibagi atas subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan rakyat, subsektor perkebunan besar dan seterusnya.

Dalam pendekatan sektoral setiap sektor dibuat sebuah analisis sehingga dapat memberikan jawaban mengenai, (1) sektor apa yang memiliki *competitive advantage* di wilayah tersebut, artinya komoditi tersebut dapat bersaing di pasar global (2) sektor apa yang basis dan nonbasis (3) sektor apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi (4) sektor apa yang memiliki *forward linkage* dan *backward linkage* yang tinggi (5) sektor apa yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal wilayah tersebut (6) sektor apa yang banyak menyerap tenaga kerja per satu satuan modal dan per satu hektar lahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Kabupaten Sumba Timur perlu melakukan analisis untuk menentukan sektor dominasi dan sektor potensial. Oleh karena itu, masing-masing sektor ekonomi dianalisis dengan menggunakan metode IDS (Indeks Dominasi Sektor) dan IPPS (Indeks Potensi Perkembangan Sektoral), indeks dominasi antar daerah dan nilai tambah sektoral, maka dengan demikian dapat diketahui sektor mana yang dapat dikembangkan dan dapat menjadi sektoral andalan daerah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari lembaga pemerintah yaitu BPS Kabupaten Sumba Timur. Adapun data yang diambil adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Sumba Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan kumpulan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen Badan Pusat Statistik (BPS) berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumba Timur dengan tahun yang digunakan adalah tahun terbaru atas dasar harga konstan, gambaran umum dan kondisian perekonomian Kabupaten Sumba Timur serta data komoditas unggulan lainnya. Dalam kepentingan penelitian ini, penelitian menggunakan sumber lain yang berasal dari referensi dari berbagai sumber pustaka, media massa dan internet.

METODE ANALISIS DATA

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab persoalan penelitian yaitu, (Yuwono, 2000) :

Analisis Sektor Dominasi dan Sektor Potensial

Untuk mengetahui sektor dominan dari masing-masing sector, maka digunakan analisis Indeks Dominasi Sektoral (IDS). IDS_i adalah indeks dari dominasi sektor i , dengan ketentuan bahwa IDS_i sekurang-kurangnya adalah nol, dan angka satu menyatakan batas dominan dan tidak dominan. Apabila $IDS_i \geq 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor dominan, sedangkan $IDS \leq 1$ maka sektor tersebut tidak dominan.

Analisis pangsa dan indeks dominasi memiliki kelemahan. Kelemahan yang dimiliki adalah sifatnya statis yang hanya menganalisis satu titik waktu saja. Untuk itu

diperlukan dukungan analisis dinamis yaitu dengan menggunakan laju pertumbuhan sektoral, g_i , dengan persamaan sebagai berikut :

$$G_{it} = \left(\frac{X_{it}}{X_{i0}}\right)^{1/t} - 1 \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

X_{it} = Nilai Tambah Sektor i pada Tahun t

X_{i0} = Nilai Tambah Sektor i pada Tahun Awal dan Eksponen t

Untuk menunjukkan persentase pertumbuhan berapakah yang dapat dianggap memiliki potensi perkembangan yang baik bagi daerah, maka digunakan indeks potensi perkembangan sektoral yang diturunkan dengan menggunakan unsur waktu. Maka persamaannya adalah sebagai berikut :

$$IDS_{it} = \frac{X_{it}}{n Y_t} \dots\dots\dots (2)$$

jika $X_{it} = X_{i0} (1+g_{it})^t$ dan $Y_t = Y_o(1+g_t)^t$ maka pangsa dapat dituliskan kembali menjadi,

$$IDS_{it} = \frac{X_{i0} (1+g_{it})^t}{n Y_o (1+g_t)^t} \dots\dots\dots (3)$$

jika pangsa sektoral berada pada posisi normal, yaitu $IDS_{i0} = 1$, maka indeks potensi perkembangan sektoral dapat dirumuskan menjadi :

$$IPPS_i = \left\{ \frac{1+g_{it}}{1+g_t} \right\}^t \dots\dots\dots (4)$$

Jika nilai dimulai dengan bilangan nol artinya tidak memiliki potensi perkembangan sama sekali. Nilai $IPPS_i = 1$ artinya memiliki potensi perkembangan rata-rata dari seluruh daerah. Apabila $IPPS_i > 1$ artinya memiliki potensi perkembangan diatas rata-rata, sebaliknya bila $IPPS_i < 1$ artinya berpotensi di bawah rata-rata.

Berdasarkan kriteria internal yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab persoalan penelitian, maka dapat diklasifikasikan sektor-sektor daerah dalam empat kategori.

Tabel 2.
Klasifikasi Sektoral Atas Dasar Analisis Internal

Kriteria	$IPPS_i < 1$	$IPPS_i > 1$
$IDS_i < 1$	(1)	(2)
$IDS_i > 1$	(3)	(4)

Dimana :

Sektor (1) adalah sektor yang tidak dominan yang belum berpotensi berkembang.

Sektor (2) adalah sektor yang tidak dominan yang berpotensi berkembang.

Sektor (3) adalah sektor dominan yang belum berpotensi berkembang.

Sektor (4) adalah sektor dominan yang berpotensi berkembang dan dapat dijadikan andalan daerah.

Analisis Komparatif dan Sektor Unggulan

Untuk menentukan sektor komparatif dan sektor unggulan maka digunakan persamaan sebagai berikut :

$$SLQ_i = \frac{ID_{ij}}{ID_i} = \frac{P_{ij}}{P_i} \dots\dots\dots (5)$$

Dimana :

ID_{ij} = Indeks Dominasi Sektor (i) Daerah Bagian (j).

ID_i = Indeks Dominasi Daerah Himpunan.

P_{ij} = Sektor (i) Daerah Himpunan.

Dengan kriteria adalah nilai $SLQ_i > 0$, dengan $SLQ_i = 1$ sebagai nilai kesebandingan. Jika $SLQ_i < 1$, berarti sektor (i) tersebut bukanlah sektor unggulan bagi daerah, dan mampu bersaing dengan sektor yang sama dari daerah lain di daerah himpunan. Semakin besar nilai SLQ semakin besar pula daya saing sektor tersebut dibandingkan sektor itu dari daerah lain di daerah himpunannya.

Untuk membandingkan laju pertumbuhan digunakan persamaan sebagai berikut

$$DLQ_{ij} = \left[\frac{1+g_{ij}/(1+g_j)}{1+G_i/(1+G)} \right]^t = \frac{IPPS_{ij}}{IPPS_i} \dots \dots \dots (6)$$

Dimana :

IPPS_{ij} = Indeks Potensi Perkembangan Sektor (i) Di Daerah (j).

IPPS_i = Indeks Potensi Perkembangan Sektor (i) Di Daerah Himpunan.

Tabel 3.

Klasifikasi Sektoral Atas Dasar Analisis Komparatif

Kriteria	DLQ _i < 1	DLQ _i > 1
SLQ _i < 1	(1)	(2)
SLQ _i > 1	(3)	(4)

Dimana :

Sektor (1) adalah Sektor-Sektor Belum Unggul yang Belum Berpotensi Unggulan.

Sektor (2) adalah Sektor-Sektor yang Belum Unggul yang Berpotensi Unggulan.

Sektor (3) adalah Sektor-Sektor Unggulan yang Tidak Berpotensi Unggulan Lagi.

Sektor (4) adalah Sektor-Sektor Unggulan yang Masih Berpotensi Unggulan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan dan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.

Laju Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Sumba Timur dan Propinsi NTT 2010-2013

No	Lapangan Usaha	Kabupaten Sumba Timur			NTT		
		2010	2013	Laju	2010	2013	Laju
1	Pertanian	1,394,682.94	1,794,701.99	0.09	10,143,870.48	12,609,473.35	0.08
2	Pertambangan dan Penggalian	3,398.00	6,181.73	0.22	620,949.34	855,343.43	0.11
3	Industri Pengolahan	628,012.90	814,970.22	0.09	2,950,303.04	3,833,932.18	0.09
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	771.47	1,545.48	0.26	79,525.53	111,643.76	0.12
5	Bangunan	54,344.14	64,988.54	0.06	1,188,137.56	1,581,679.62	0.10
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	554,360.95	687,881.43	0.07	3,734,976.57	4,905,688.82	0.10
7	Pengangkutan dan Komunikasi	129,684.86	192,770.22	0.14	1,260,798.39	1,804,382.44	0.13
8	Bank, Lembaga Keuangan dan Persewaan	78,571.16	134,842.48	0.20	890,938.54	2,088,364.48	0.33
9	Jasa-Jasa	103,792.81	115,488.24	0.04	2,087,750.98	2,477,575.19	0.06
	PDRB	2,947,619.24	3,813,370.34	0.09	22,957,250.43	30,268,083.25	0.10

Sumber : BPS NTT, Data Diolah (2014)

Propinsi NTT pada tahun 2010-2013 rata-rata laju pertumbuhan per tahun yang tertinggi adalah bank, lembaga keuangan dan persewaan yaitu sebesar 0,33 %, diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 0.13 %, sektor ketiga diikuti oleh listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 0.12 %, sedangkan rata-rata laju pertumbuhan per tahun terendah terjadi pada sektor jasa-jasa yaitu sebesar 0.06 %.

Tabel 5.
Dominasi Sektoral dan Potensi Sektoral Kabupaten Sumba Timur

No	Lapangan Usaha	IDS	IPPS
1	Pertanian	5.23	0.99
2	Pertambangan dan Penggalian	0.02	1.41
3	Industri Pengolahan	2.37	1.00
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.00	1.55
5	Bangunan	0.19	0.92
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.00	0.96
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.56	1.15
8	Bank, Lembaga Keuangan dan Persewaan	0.39	1.33
9	Jasa-Jasa	0.34	0.86

Sumber : Data diolah (2014)

Sektor yang memiliki potensi perkembangan yang tinggi untuk dikembangkan di kabupaten Sumba Timur adalah sektor yang memiliki angka $IPPS_i \geq 1$, sektor-sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor bank, lembaga keuangan dan persewaan.

Berdasarkan dua kriteria internal tersebut, maka sektor-sektor di kabupaten Sumba Timur dapat diklasifikasikan dalam empat kategori yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.

Klasifikasi Sektoral Di Kabupaten Sumba Timur Atas Dasar Analisis Internal

Kriteria	$IPPS_i < 1$	$IPPS_i > 1$
$IDS_i < 1$	(1) Sektor Bangunan Sektor Jasa-Jasa	(2) Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor Bank, Lembaga Keuangan dan Persewaan
$IDS_i > 1$	(3) Sektor Pertanian Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	(4) Sektor Industri Pengolahan

Tabel di atas menjelaskan bahwa sektor (1) adalah sektor-sektor yang tidak dominan yang belum berpotensi berkembang. Sektor yang termasuk adalah sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. Sektor (2) adalah sektor-sektor yang tidak dominan yang berpotensi berkembang. Sektor ini kemudian hari dapat dijadikan andalan daerah. Sektor yang termasuk adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor bank, lembaga keuangan dan persewaan. Sektor (3) adalah sektor-sektor dominan yang belum berpotensi berkembang. Sektor yang termasuk adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor (4) adalah sektor-sektor dominan yang berpotensi berkembang, dan dapat dijadikan andalan daerah. Sektor yang termasuk adalah sektor industri pengolahan.

Tabel 7.

Dominasi Sektoral dan Potensi Sektoral Propinsi Nusa Tenggara Timur

No	Lapangan Usaha	IDS	IPPS
1	Pertanian	4.63	0.94
2	Pertambangan dan Penggalian	0.31	1.04
3	Industri Pengolahan	1.41	0.99
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.04	1.06
5	Bangunan	0.58	1.01
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.80	1.00
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.66	1.09
8	Bank, Lembaga Keuangan dan Persewaan	0.77	1.78
9	Jasa-Jasa	0.91	0.90

Sumber : Data Sekunder Diolah (2014)

Tabel di atas menjelaskan bahwa sektor dominan di kabupaten Sumba Timur yang $IDS_i \geq 1$ adalah sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, hotel dan restoran. Sektor yang tidak dominan yang $IDS_i \leq 1$ adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor bank, lembaga keuangan dan persewaan dan sektor jasa-jasa.

Sektor yang memiliki potensi perkembangan yang tinggi untuk dikembangkan di kabupaten Sumba Timur adalah sektor yang memiliki angka $IPPS_i \geq 1$, sektor-sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor bank, lembaga keuangan dan persewaan.

Tabel 8.

Klasifikasi Sektoral Di Propinsi Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Analisis Internal

Kriteria	$IPPS_i < 1$	$IPPS_i > 1$
$IDS_i < 1$	(1) Sektor Jasa-Jasa	(2) Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Sektor Bangunan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor Bank, Lembaga Keuangan dan Persewaan
$IDS_i > 1$	(3) Sektor Pertanian Industri Pengolahan	(4) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Tabel di atas menjelaskan bahwa (1) adalah sektor-sektor yang tidak dominan yang belum berpotensi berkembang. Sektor yang termasuk adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan; (2) sektor-sektor yang tidak dominan yang berpotensi berkembang. Sektor ini kemudian hari dapat dijadikan andalan daerah. Sektor yang termasuk adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor bank, lembaga keuangan dan persewaan; (3) sektor-sektor dominan yang belum berpotensi berkembang. Sektor yang termasuk adalah sektor jasa-jasa; (4) sektor-sektor dominan yang berpotensi berkembang, dan dapat dijadikan andalan daerah. Sektor yang termasuk adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 9.
Komparatif dan Sektor Unggulan

No	Lapangan Usaha	SLQ	DLQ
	Pertanian	1.13	1.05
2	Pertambangan dan Penggalian	0.06	1.35
3	Industri Pengolahan	1.69	1.02
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.11	1.45
5	Bangunan	0.33	0.92
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.11	0.96
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.85	1.06
8	Bank, Lembaga Keuangan dan Persewaan	0.51	0.75
9	Jasa-Jasa	0.37	0.96

Sumber : Data Diolah (2014)

Tabel di atas menjelaskan bahwa sektor yang memiliki daya saing, terdiri dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran. Sedangkan sektor yang tidak memiliki daya saing yaitu sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, bank, lembaga keuangan dan persewaan dan jasa-jasa. Semakin besar nilai SLQ semakin besar pula daya saing sektor tersebut dibandingkan sektor itu dari daerah lain di daerah himpunannya. Oleh karena itu, syarat dari daya saing adalah $SLQ \geq 1$.

Sektor yang memiliki potensi perkembangannya kalah dengan daerah-daerah lain di daerah himpunannya, yaitu bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, bank, lembaga keuangan dan persewaan dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang memiliki potensi perkembangannya lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain yaitu, sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri dan pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi. Syarat dari sektor yang memiliki potensi perkembangannya adalah $DLQ \geq 1$.

Tabel 10.

Klasifikasi Sektoral Di Sumba Timur Atas Dasar Analisis Komparatif

Kriteria	$DLQ_i < 1$	$DLQ_i > 1$
$SLQ_i < 1$	(1) Sektor Bangunan Sektor Bank, Lembaga Keuangan dan Persewaan Sektor Jasa-Jasa	(2) Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
$SLQ_i > 1$	(3) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	(4) Pertanian Industri Pengolahan

Tabel di atas menjelaskan bahwa (1) sektor-sektor belum unggul yang belum berpotensi unggul. Sektor yang termasuk adalah sektor bangunan, sektor bank, lembaga keuangan dan persewaan dan sektor jasa-jasa; (2) sektor-sektor yang belum unggul yang berpotensi unggul. Sektor yang termasuk adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor pengangkutan dan komunikasi; (3) sektor-sektor unggulan yang tidak berpotensi unggul lagi. Sektor yang termasuk adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; (4) sektor-sektor unggulan yang masih

berpotensi unggulan. Sektor yang termasuk adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Sektor potensial dan dominan di Kabupaten Sumba Timur tahun 2013 adalah sektor-sektor industri pengolahan.
2. Sektor unggulan di Kabupaten Sumba Timur tahun 2013 adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur harus terus mendorong kebijakan pembangunan industri pengolahan yang berbasis pertanian yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing di pasar lokal, regional, nasional dan global.
2. Pemerintah perlu mendorong kebijakan di sektor pertanian dan sektor industri pengolahan dalam memproduksi barang yang laku dijual.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Hudang, Adrianus Kabubu. 2011. *Strategi Pembangunan Wilayah dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pendapatan Wilayah Kabupaten Sumba Timur*. Jurnal Transformatif, vol 1 (1).
- Jhingan, M. L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : P.T. Rajagrafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mawardi, Ikhwanuddin. 2007. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Konsep Produktifitas Unggulan*. Jurnal Teknologi dan lingkungan, vol 8 (2).
- Safi'I, H. M. 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Malang : Averroes Press.
- Tarigan, Robinson. 2010. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : P.T. Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2010. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan. Jakarta : Erlangga.
- Trisanto, Afrendi Hari. 2013. *Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dalam Pengembangan Potensi Perekonomian di Kota Blitar*. Skripsi di Publikasikan tahun 2013.
- Yulianita, Anna. 2009. *Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Jurnal Ekonomi Pembangunan di Publikasikan.
- Yuwono, Prapto. 2000. *Perencanaan dan Analisis Kebijakan Pembangunan*. Salatiga : Fakultas Ekonomi Universitas Salatiga.
- Valeria, Angela, Aries, Kristyanto, Rukmadi, Warsito. 2007. *Kemampuan Daya Dukung serta Penentuan Subsektor Andalan dan Unggulan di Sektor Pertanian di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat*. Jurnal Agric Vol 19 (2).